

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi pemerintahan adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen departemen dibawahnya. Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bermacam-macam, hal ini merupakan konsekuensi dari luasnya wilayah publik, sehingga setiap disiplin ilmu (politik, ekonomi, hukum dan sosial) memiliki cara pandang dan defenisi yang berbeda-beda. ⁸

Sudut pandang ekonomi sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas (kesatuan) yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik. Sejalan dengan perkembangan maka di negara kita akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN,BUMD,LSM dan yayasan sosial, pemerintahan desa, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. ⁹

⁸ Dita Adita, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 1, Cet ke- 1, (Ponorogo;Uwais,2019), hal. 12

⁹ Ibid, 17

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

- 1) Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atas alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan terkait dengan pengendalian manajemen.
- 2) Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.¹⁰

B. Pengertian Desa dan Pemerintah Desa

Menurut permendagri RI Nomer 114 Tahun 2014, desa adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa disebut kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan negara.¹¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2013) desa adalah suatu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau desa merupakan kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan.¹²

¹⁰ Monika Handayani, *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 1 Cet ke 1, (Banjarmasin;POLIBAN PRESS,2019),hal. 3

¹¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri, No.114 Tahun 2014 tentang *pengertian desa*

¹² Kbbi, "*Desa*"

Widjaja (2013) menyatakan bahwa “desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa”. Landasan pemikiran mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah kumpulan masyarakat hukum dan merupakan organisasi terendah dibawah Kecamatan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangganya dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hukum dan adat istiadat setempat.¹³

Menurut Permendagri RI Nomer 113 Tahun 2014 pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia. Menurut Awang (2010) “ pemerintahan desa secara historis dibentuk oleh masyarakat desa dengan memilih beberapa orang anggota masyarakat yang dipercaya dapat mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan mereka”.¹⁴

Widjaja (2013) menjabarkan kepmendagri No. 64 Tahun 1999 menyatakan bahwa pemerintahan desa adalah “ kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintahan desa BPD”. Menurut Soem (2010) pemerintahan desa terdiri dari kepala desa dan perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksanaan teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang jumlahnya

<https://kbbi.web.id/desa> di akses pada tanggal 20 Maret 2021 pukul 17.20

¹³ Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*, (Jakarta:Rajawali Pers,2008), hal.70

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 Tahun 2014 Tentang *Pemerintahan Desa*

disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya setempat. Pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakrsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa (UU No. 6 Tahun 2014 pasal 18).¹⁵

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa, menjelaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerinttahan oleh pemerinah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kasatuan Rebulik Indonesia. Siklus pengelolaan keuangan desa merupakan tanggungjawab dan tugas dari kepala desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa (Sekretaris desa, Kepala seksi, dan Bendahara desa).

1. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Kepala desa memiliki kewenangan yaitu: menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD), menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran kegiatan yang ditetapkan pengeluran atas beban APBDesa.

¹⁵ Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga, Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negari No.64 tahun 1999 tentang kegiatan pemerintah desa*, (Jakarta;Rajawali Pers,2013), hal.15

2. Sekretaris Desa selaku koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas: menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB). Sekretaris desa mendapat pelimpahan kewenangan dari kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada kepala desa.
3. Kepala seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya, sesuai PP No47 Tahun 2015 pasal 64 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas: menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggungjawab. Melaksanakan kegiatan bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa. Melakukan tindakan pengeluaran ang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Mengajukan SPP dan

melengkapinya dengan bukti-bukti pendukung atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penata usaha dilakukan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku bank. Penata usaha yang dilakukan antara lain meliputi yaitu: menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Pertanggungjawab uang melalui laporan pertanggungjawaban. (Permendagri RI Nomor 113 Tahun 2014)

Uraian di atas dijelaskan bahwa pemerintahan desa terdiri dari kepala desa beserta perangkat desa, dan Badan Permusyawaratan Desa yang dipercaya oleh masyarakat untuk bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa seperti mengatur, menata, melayani, memelihara dan melindungi berbagai aspek kehidupan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat.

C. Kualitas Laporan Keuangan Desa

IAI-KASP (2015) menjelaskan bahwa membuat laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi. Data laporan keuangan diambil dari seluruh proses yang dilakukan sampai dengan dibuatnya neraca lajur. Data

yang diproses berdasarkan neraca lajur itulah digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan.¹⁶

Jurnal petunjuk pelaksanaan bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 menyatakan bahwa laporan keuangan yang harus dibuat oleh pemerintah desa antara lain;¹⁷

1) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, terdiri dari:

- a. Laporan semesteran pertama, disampaikan paling lambat bulan juli tahun berjalan.
- b. Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester I dibandingkan dengan target dan anggarannya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.¹⁸

2) Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa

¹⁶ Wiwin Yadiati, *Kualitas Pelaporan Keuangan Kajian Teoritis dan Empiris*, Cet ke-1,(Yogyakarta:Kencana,2017), hal.6

¹⁷ Icak Rangga, Erwin Setyadi, *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*, (Jakarta; Grasindo, 2019) hal. 125

¹⁸ Ibid, hal 129

Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah pemerintah desa dan BPD telah sepekat terhadap laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati/walikota sebagai bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana tercantum dalam pasal 41 permendagri 113/2014, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berkenanaan.¹⁹

3) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporaan realisasi penggunaan dana desa disampaikan kepada Bupati/Walikota setiap semester, penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa dilakukan:²⁰

- a. Untuk semester I paling lambat minggu keempat bulan juli anggaran berjalan.
- b. Untuk semester II paling lambat minggu keempat bulan januari tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan laporan dana desa dari desa -desa yang ada di wilayah kabupaten/kota, Bupati/Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran

¹⁹ Ibid, hal. 133

²⁰ Udik Jatmika, Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal Melalui Alokasi Dana Desa, (Jakarta; Gramedia, 2015) hal 45

dan konsolidasi penggunaan dana desa kepada menteri keuangan dengan tembusan menteri yang menangani desa, menteri teknis/pimpinan lembaga pemerinah non kementrian terkait, dan gubernur paling lambat minggu keempat bulan maret tahun anggaran berikutnya.

4) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa merupakan laporan yang disampaikan secara periodek kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDesa yang telah disepakati di awal tahun dalam bentuk perauran desa. Laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDesa dilampiri: ²¹

- a. Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenan.
- b. Format laporan kekayaan milik desa per 31 desember tahun anggaran berkenam.
- c. Format laporan program pemeritah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Laporan ini disampaikan kepada BPD secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran (PP 43/2014 pasal 51). Peraturan pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjelaskan tentang karakteristik laporan keuangan yaitu ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

²¹ Riant Nugroho, *Kesehatan Desa Bagian 3: Desa Sehat dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta; Gramedia, 2021), hal.30

tujuan²². Berikut adalah karakteristik yang diperlukan agar laporan keuangan pemerinah desa memenuhi kualitas yang kemudian dapat digunakan dalam menentukan indikator kualitas laporan keuangan pemerintahan desa sebagai berikut:

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan, beberapa indikaor yang dapat mempengaruhi relevan kualitas laporan keuangan sebagai berikut:

1) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang dengan mengacu pada hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

2) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

3) Tepat Waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

²² Bintaro Wardiyanto, Siti Aminah, dan Ucu Martanto, *Percikan Pemikiran Tata Kelola Pembangunan Desa*, (Surabaya;Airlangga University Press, 2016), hal.392

4) Lengkap

Informasi disajikan selengkap mungkin yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

5) Format laporan keuangan

Informasi disajikan harus sesuai dengan format laporan keuangan yang sudah ditetapkan dalam menyusun laporan keuangan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, menyajikan fakta secara jujur, dan dapat diverifikasi informasi yang andal setidaknya memenuhi beberapa indikator sebagai berikut:

1) Dapat diverifikasi

Informasi dalam laporan keuangan dapat diuji, akan lebih baik apabila dilakukan pengujian lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda dari hasilnya tidak jauh berbeda.

2) Penyajian jujur

Informasi menggambarkan secara jujur transaksi yang seharusnya disajikan atau secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

3) Netralitas

Informasi diarahkan pada kepentingan dan tidak mementingkan kepentingan pihak tertentu.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.²³ beberapa indikator yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan.
- 2) Menggunakan kebijakan akuntansi sama dari tahun ke tahun.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Beberapa indikator yang mempengaruhi hal tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan telah disusun secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna.

²³ Moermahdi S Djanegara, *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, (Bogor; Kesatuan Press, 2017) hal 195

D. Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan alur dan unsur yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan ada lima faktor utama yang menentukan kualitas laporan keuangan yaitu (Pradono dkk, 2015²⁴):

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

2. Teknologi Informasi

Konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem komputer dan penggunaan jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas.

3. Peran PPK-SKPD

Penjabat penata usaha keuangan SPKD (PPK- SPKD) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan SKPD.

4. Rekonsiliasi

Rekonsiliasi merupakan salah satu kunci dalam upaya penyusunan laporan keuangan yang kredibel. Hal ini disebabkan oleh perannya yang cukup penting dalam rangka meminimalisasi terjadinya perbedaan

²⁴ Pradono, *Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan*, (Ponorogo,Indeopress, 2015), hal. 95

percatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan.

5. Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian internal adalah integral tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ke lima faktor diatas, maka peneliti mengambil 3 faktor yang akan dijadikan fokus kajian . pertama kompetensi sumber daya manusia, kedua pemanfaatan teknologi informasi, ketiga sistem pengendalian intern. Hal tersebut diperkuat oleh penjelasan Wiwin Yadiati (2017), Sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi serta pengendalian intern memiliki peran kunci dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan sebab kemampuan keterampilan aparatur dalam mengelola laporan keuangan harus digabungkan dengan teknologi informasi guna menciptakan informasi yang dapat diakses oleh publik, sedangkan pengendalian intern digunakan sebagai proses pengawasan yang integral guna meningkatkan efektif dan efisien.²⁵

²⁵ Wiwin Yadianti, *Kualitas Laporan Keuangan*, Cet ke-1, Edisi 1, (Jakarta, Kencana, 2017), hal. 65

E. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), suatu sistem untuk melaksanakan fungsinya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Menurut Tjiptoherijanto (2001), Alim budiono dan Fidelis (2004), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari *level of responsibility* dan kompetensi sumber daya tersebut. Tanggung jawab dapat dilihat dari atau tertuang dalam deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik.²⁶

Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi merupakan karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (*skill*), pengetahuan (*Knowledge*), serta kemampuan (*ability*), untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Menurut beberapa pakar kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Pekerja yang tidak

²⁶ Amaruddin Idris, *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia Dan Ketenagakerjaan*, Edisi 1, Cet ke-1, (Yogyakarta;Deepublish,2016), hal 87

mempunyai pengetahuan yang cukup akan bekerja tersendat-sendat dan juga mengakibatkan pemborosan bahan, waktu, dan tenaga.

Menurut Dunnetts dalam anonim, skill adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu rangkaian tugas yang berkembang dari hasil pelatihan dan pengalaman. menurut Blanchard dan Thacker (2004) dalam anonim, skill seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimpelentasikan suatu strategi organisasi.²⁷

Menurut Laerence Green indikator adalah variabel yang dapat menunjukkan mengindikasikan kepada pengguna tentang kondisi tertentu. Indikator kompetensi sumber daya manusia terdapat 3 hal yaitu:

1) Tanggung Jawab

Menurut Widagdho tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti perbuatan sebagai wujud dari kesadaran akan kewajiban.

1) Peran pengelolaan keuangan

Menurut Syarifudin definisi pengelolaan keuangan adalah tindakan administratif yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan dan

²⁷ Vaitzal Rivai Zainal dkk, *Manajen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Edisi 3, Cet ke-6, (Jakarta; Rajawali Pers, 2014), hal 55

pengawasan keluar masuknya uang/dana organisasi. Jadi pengelolaan keuangan dalam instansi pemerintahan desa sangat penting dalam pengoptimalan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan.

Pengelolaan keuangan desa menjadi tanggung jawab kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014. Pemahaman tentang peraturan tentang desa, pertanggungjawab, bermoral, dan kepribadian dalam menjalankan tugas untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

2) Fungsi Akuntansi

Menurut Hery (2012), “ Akuntansi mempunyai fungsi memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi tentang posisi keuangan serta hasil kinerja perusahaan, yang dimaksudkan akan menjadi berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dari berbagai pilihan yang ada”.

Menurut Sumarsan fungsi akuntansi memberikan informasi keuangan organisasi/perusahaan, mengalokasikan sumber-sumber daya langka sehingga pemakai informasi dapat memutuskan model harus digunakan dalam melaporkan pertanggung jawaban kinerja. Fungsi akuntansi dapat disimpulkan sebagai pemberi informasi mengenai perilaku ekonomi yang diakibatkan oleh aktivitas-aktivitas perusahaan dalam lingkungannya serta sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

3) Pedoman Proses Akuntansi

Pedoman merupakan suatu kumpulan dari ketentuan dasar yang dapat memberikan arah bagaimana sesuatu harus dilakukan dan bisa juga diartikan sebagai hal pokok atau yang bersifat dasar yang menjadi pegangan, petunjuk dan sebagainya. Menurut Syafri Harahap proses pengolahan data sejak terjadinya transaksi, kemudian transaksi ini memiliki bukti yang sah sebagai dasar terjadinya transaksi kemudian berdasarkan data bukti yang kemudian diproses.

2) Pelatihan

Menurut Widodo pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional dibidangnya. Pelatihan berkaitan dengan keahlian dan kemampuan pegawai untuk melaksanakan pekerjaan.

1) Mendapatkan Pelatihan

Menurut Rivai pelatihan adalah proses secara sistematis mengubah tingkah laku pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Pelatihan dilakukan bertujuan agar para pegawai apratur desa memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan, maka pelatihan perlu dilakukan untuk menambah skill dan kemampuan.

2) Memahami Materi Pelatihan

Menurut Anas Sudjino pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan

diingat, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang diketahui dan dapat dilihat dari berbagai segi. Materi pelatihan merupakan program atau kegiatan yang melibatkan akuisisi pengetahuan dan retensi. Dalam rangka pemantapan pemahaman kepada aparatur desa untuk menguatkan pengetahuan dan implementasi penggunaan anggaran.

Pembangunan kapasitas apratur desa patut ditingkatkan dalam optimalisasi strategis belajar dalam mengkaji berbagai permasalahan tentang pengelolaan keuangan desa.

3) Materi Pelatihan Sesuai Kebutuhan

Menurut Robert Gagne dalam bukunya Prinsip-prinsip belajar untuk mengajar ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh organisasi dalam rangka pengembangan manajemen pelatihan yaitu analyse, design, develop, implement, evaluation, penerapan tersebut didasari pada anggapan bahwa pelatihan haruslah dimulai adanya needs akan meningkatkan kompetensi meliputi tahapan-tahapan secara sistematis, dimulai dari analisis, desain, pengembangan, implemmentasi dan evaluasi.

Kegiatan pelatihan apratur desa harus disesuaikan dengan kebutuhan. Hal tersebut guna mencapai sasaran dalam meningkatkan pengelolaan keuangan desa serta peningkatan kualitas pelaporan kepada publik.

3) Pengalaman

Menurut Kotler pengalaman adalah pembelajaran yang mempengaruhi perubahan perilaku seseorang. Pengalaman merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Pengalaman juga sangat berharga bagi setiap manusia, dan memberikan pembelajaran.

1) Pengalaman untuk Menjalankan Tugas

Menurut Alwi pengalaman kerja adalah jangka waktu atau lamanya bekerja pada suatu instansi. Pengalaman dalam menjalankan tugas mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan informasi pada tanggung jawab pekerjaan. Kemampuan tersebut digunakan untuk menjalankan tugas dengan baik.

2) Berpengalaman dibidang akuntansi

Aparatur desa dalam menjalankan tugasnya dibidang keuangan, dituntut untuk menguasai bidang akuntansi karena dalam penerapannya pemahaman akuntansi tidak hanya sekedar pencatatan, namun pengolahan transaksi menjadi informasi yang dapat dipertanggung jawabkan.

F. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat

dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi ini merupakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu dengan komputer yang lainya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat diakses secara global teknologi informasi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software, database, jaringan).²⁸

Salah satu pendorong dan termasuk refermasi pemerintahan untuk mewujudkan *good governance* (khususnya dalam pelaksanaan otonomi desa) adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan, dan pembangunan (Akadun, 2009;130). Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia (Winidynigrum dan Rahmawati, 2010). Pengolahan data menjadi sebuah informasi dengan menggunakan bantuan komputer akan lebih meningkatkan nilai dari sebuah informasi yang dihasilkan. Peningkatan nilai informasi misalnya, informasi yang memiliki nilai tinggi adalah informasi yang disediakan dalam waktu yang cepat dan tepat.²⁹

Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 menjelaskan bahwa pemerintah selaku perumus dan pelaksanaan kebijakan APBN berkewajiban untuk terbuka dan bertanggungjawab terhadap seluruh hasil pelaksanaan

²⁸ Eni Fariyatul Fahyuni, *Teknologi Informasi dan Komunikasi*, (Sidoarjo, UMSIDA Press,2017) hal 51

²⁹ Irwansyah Edy, *Pengantar Teknologi Informasi*,Edisi 1, Cet ke-1,(Yogyakarta;Deepublish,2014), hal 15

pembagunaan. Salah satu bentuk pertanggung jawaban tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi keuangan yang komprehensif kepada masyarakat luas, termasuk informasi keuangan desa.³⁰ Pesatnya kemajuan teknologi informasi serta potensi pemanfaatannya secara luas mampu membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi secara cepat dan akurat untuk lebih mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.³¹

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal, akan memberikan kemudahan terhadap pekerjaan yang akan dilakukan, serta dapat meminimalisir tingkat kesalahan. Teknologi informasi sangat dibutuhkan bagi organisasi untuk memudahkan setiap organisasi dalam mengolah data secara cepat, lengkap, dan akurat agar tujuan organisasi dapat tercapai. Peran dalam menciptakan nilai antara lain :³²

- 1) Meningkatkan Efisiensi
- 2) Meningkatkan Keakuratan dan kekinian(up to date) catatan instansi.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan
- 4) Meningkatkan kualitas perencanaan (penyusunan anggaran).

Teori Pemanfaatan teknologi informasi terdapat lima yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi adalah keamanan data,

³⁰ Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 Tentang *Sistem Informasi Keuangan Daerah*

³¹ George H Bodnar dan Wiliam S Hopwood, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi 9,(Yogyakarta; ANDI,2006) hal 7

³² Atyanto Mahatmyo, *Sistem Informasi Akuntansi Suatu Pengantar*, (Yogyakarta,Deepulish,2014) hal 13

kecepatan dan ketepatan waktu akses, ketelitian, variasi laporan atau output, dan relevansi atau kesesuaian, dijabarkan sebagai berikut :

a. Keamanan data

Keamanan data adalah praktik melindungi informasi digital dari akses tidak sah, korupsi, atau pencurian. Pentingnya keamanan data dalam mencegah potensi kerugian material. Kedua dapat mengurangi resiko penyalahgunaan data, terakhir memperkecil tindakan kriminal. Indikator keamanan data diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tingkat keamanan data dengan adanya sistem password.
- 2) Tingkat keamanan data dengan adanya menu peringatan.
- 3) Tingkat keamanan data yang tersimpan akibat terjadinya tegangan listrik.
- 4) Tingkat keamanan data yang tersimpan dalam sistem akibat terkena virus.

b. Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses

Menurut Hartono Kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan sejenis secara terus-menerus dalam waktu cepat, sedangkan ketepatan waktu informasi bagi pembuat keputusan untuk mempengaruhi keputusan. Dalam penerapan keuangan desa kecepatan waktu dan ketepatan dibutuhkan dalam proses pembuatan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh beberapa indikator sebagai berikut:

- 1) Tingkat kecepatan mengakses masuk dan keluar.
- 2) Tingkat kecepatan dalam menginput data.

- 3) Tingkat kecepatan dalam memproses dan mengolah data menjadi laporan keuangan dana desa.
- 4) Tingkat kecepatan dalam memproses dan mengolah data menjadi laporan keuangan desa
- 5) Tingkat kecepatan dalam mencetak laporan dana desa sewaktu-waktu diperlukan.

c. Ketelitian

Menurut Ashari teliti berarti cermat dan seksama dalam menjalankan sesuatu, sedangkan ketelitian dapat diartikan kesaksamaan atau kecermatan. Pemanfaatan teknologi informasi membutuhkan ketelitian dalam proses hingga mampu mempengaruhi kualitas pelaporan. Indikator ketelitian dalam proses keuangan desa terdapat tiga (3) diantaranya yaitu:

- 1) Tingkat ketelitian dalam perhitungan angka
- 2) Tingkat ketelitian dalam menyajikan data
- 3) Tingkat ketelitian dalam proses analisis data

d. Variasi Laporan atau Output

Variasi laporan keuangan desa atau output maka tidak hanya mengenai tingkat volume dari suatu teknologi tetapi juga mengenai tingkat informasi. Mengetahui kemampuan sistem informasi perlu dilihat dari kemampuan dalam membuat suatu laporan dengan pengembangan dan perhitungan sesuai dengan kebutuhan yang berguna bagi pengguna informasi. Beberapa indikator yang mempengaruhi variasi laporan diantaranya yaitu:

- 1) Variasi laporan dapat memberikan laporan yang bervariasi untuk masing-masing menu atau bagian.
- 2) Variasi laporan dapat menyajikan laporan harian yang bervariasi sesuai format yang berlaku.
- 3) Variasi laporan dapat menyajikan laporan bulanan yang variatif sesuai dengan format yang berlaku.
- 4) Variasi laporan dapat mencetak laporan keuangan semesteran dan tahunan sesuai dengan keperluan.
- 5) Relevansi atau kesesuaian

Suatu tingkat penilaian yang ditunjukkan dari manfaat suatu sistem dihasilkan dari produk atau keluaran informasi baik dalam analisis data, pelayanan, maupun penajian data. Relevansi bertujuan menunjukkan kesesuaian dan manfaat laporan yang dihasilkan. Beberapa indikator yang mempengaruhinya adalah sebagai berikut:

1. Tingkat relevansi dalam penyajian data keuangan dana desa.
2. Tingkat relevansi dalam analisis data keuangan dana desa.
3. Tingkat relevansi dalam pengolahan dan penyimpanan data keuangan dana desa.
4. Tingkat relevansi terhadap pengguna laporan keuangan dana desa.

G. Sistem Pengendalian Intern

Pengendalian intern merupakan bagian dari masing-masing sistem yang digunakan sebagai prosedur dan pedoman operasional. Perusahaan atau

organisasi tertentu, pengendalian sistem intern untuk mengarahkan operasional dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem.³³ Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal, serta menjamin ditaatinya hukum dan peraturan yang berlaku. Dilihat dari tujuan tersebut, maka sistem pengendalian intern dapat dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Pengendalian intern akuntansi

Dibuat untuk mencegah terjadinya inefisiensi yang tujuannya adalah menjaga kekayaan dan memeriksa keakuratan data akuntansi. Sebagai contoh, adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab antar unit organisasi.

2. Pengendalian Administratif

Dibuat untuk mendorong dilakukannya efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Contohnya adalah adanya pemeriksaan laporan untuk mencari penyimpangan yang ada, untuk kemudian diambil tindakan.³⁴

Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah bahwa SPIP terdiri dari unsur-unsur berikut;³⁵ berdasarkan peraturan tersebut, indikator yang mempengaruhi sistem pengendalian intern antara lain sebagai berikut:

³³ Nurul Lathifah, *Konsep DAN Praktik Sistem Pengendalian Internal*, (Sumatra Barat; Insan Candekia Mandiri, 2021) hal 1

³⁴ Heru Maruta, *Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi*, Jurnal Akuntansi, STIE Syariah Bengkalis, Vol 3 No. 5, hal 19

³⁵ Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern*

a. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerjama.

Indikator Lingkungan pengendalian terdiri ;

- 1) Penegakkan integritas dan nilai etika
- 2) Komitmen terhadap kompetensi
- 3) Kepimpinan yang kondusif
- 4) Pembentukan struktur yang sesuai dengan kebutuhan
- 5) Pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab

b. Penilaian Resiko

Dalam rangka penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintah dapat menetapkan tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan, dengan perpedoman pada peraturan perundang-undang. Indikator penilaian resiko terdiri dari :³⁶

- 1) Analisis secara lengkap terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran
- 2) Rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran terhadap sistem serta prosedur

c. Aktivitas Pengendalian

³⁶ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen*, Edisi 1, Cet Ke-1, (Jakarta;Kencana, 2014), hal. 7

Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas dari tugas dan fungsi yang bersangkutan. Indikator penyelenggaraan aktivitas pengendalian terdiri dari:

- 1) Seluruh proses transaksi di dalam komputer telah diotorisasi.
- 2) Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan.
- 3) Pengawai dan atasan telah memahami tujuan dari kegiatan pengendalian
- 4) Peralatan dan persediaan disimpan serta diamankan

d. Pemantuan

Pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan pemantuan sistem pengendalian intern. pemantuan sistem pengendalian intern wajib mengidentifikasi, mencatat, dan pemantuan informasi dalam buku dan waktu yang tepat. Pemantuan atas informasi harus diselenggarakan secara efektif. Beberapa indikator yang mempengaruhi pemantuan sebagai berikut:³⁷

- 1) Sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, kantor pemerintahan desa melakukan perbaikan internal.
- 2) Menindak lanjuti setiap temuan dan saran yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam laporan keuangan.

³⁷ Faiz, Nabella dan Ihda, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021), hal 32

H. Teori Hubungan Variabel

Peneliti perlu menjelaskan terlebih dahulu hubungan antara masing-masing variabel independen dengan dependen (X₁ terhadap Y, X₂ terhadap Y, dan X₃ terhadap Y), sebelum peneliti melakukan pengukuran mengenai pengaruh dari setiap variabel. Hal tersebut dilakukan melalui teori faktor, yang menjelaskan hubungan dari masing-masing variabel dengan variabel independen.

1. Hubungan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Kompetensi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugasnya yang berupa sikap, perilaku, ataupun pengetahuan. Mardiasno mengemukakan bahwa pembuatan laporan keuangan akan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila sumber daya manusia mampu. Hal ini disebabkan adanya ilmu pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman yang dimiliki terhadap sesuatu yang harus dikerjakan. Sehingga dapat menghasilkan dan menyajikan pelaporan keuangan dengan tepat waktu, kemudian informasi tersebut dapat diambil dalam mengambil keputusan.³⁸

Harisjho menegaskan bahwa kinerja organisasi dapat diperbaiki dan ditingkatkan dengan adanya tingkat pendidikan seorang pegawai. Maka dari itu dibutuhkan sumber daya yang mumpuni mengenai akuntansi keuangan pemerintah daerah untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat

³⁸ Mardiasno, Akuntansi Sektor Publik..., hal.160

diandalkan. Kurangnya kompetensi sumber daya manusia akan mempengaruhi sistem berjalan lebih lambat.³⁹

Peneliti yang didasarkan dari teori yang dikemukakan Mardiasmo dan Hariandja, maka penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan pemerintah desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

H1 : *Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah desa.*

2. Hubungan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Pemanfaatan teknologi informasi memiliki keterkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Dalam hal ini tak dapat dipisahkan antara keduanya, penggunaan teknologi seperti komputer, elektronik dan telekomunikasi, untuk mengolah dan distribusikan informasi dalam bentuk digital.⁴⁰ Dalam penjelasan Peraturan No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Pelaporan Desa disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggarannya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah, dan pemerintah

³⁹ Hariandja, M.T.E, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta; Grasindo, 2002), hal 169

⁴⁰ Reman A. Purba, *Apalikasi Teknologi Informasi: Teori dan Implementasi*, (Yogyakarta; Yayasan Kita Menulis, 2020), hal.48

daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan, dan menyeluruh informasi keuangan desa, dan menyelurkan informasi keuangan desa kepada pelayanan publik, pemerintah, dan pemerintah desa.

⁴¹Berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola laporan, dan menyalurkan informasi keuangan desa pelayanan publik.

Penelitian berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi sudah pernah dilakukan oleh penelii sebelumnya. Peneliti yang dilakukan oleh Nurilah (2014) menatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Peneliiian yang dilakukan oleh Mukadarul (2016) mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurillah yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian Surastiani dan Handaani (2015) menyatakan bahwa pemanfaata teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerinah daerah. ⁴²

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan pemerintah desa Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

⁴¹ Ibid, hal.52

⁴² Nurlilah A S, Muid D, Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, (Studi Empiris Pada SPKD Kota Depok) Jurnal Akuntansi, Vol.3 No.4, 2014

H2: *Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah desa*

3. Hubungan Sistem pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Desa

Pengendalian sistem intern, bertujuan untuk menciptakan efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan yang telah disepakati. Sistem pengendalian intern diterapkan di seluruh organisasi, baik organisasi sektor publik, organisasi sektor bisnis, maupun organisasi sosial. Penyimpangan, kecurangan, dan kesalahan dapat diminimalisasi dengan adanya sistem pengendalian intern yang memadai.⁴³

Penyimpangan yang terjadi dalam laporan keuangan masih sering terjadi, menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintahan desa belum memenuhi karakteristik informasi yang disyaratkan. Hasil audit yang dilakukan oleh BPK, yang memberikan opini “ tidak wajar dan disclaimer” diantaranya disebabkan oleh kelemahan sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh pemerintahan desa terkait pelaksanaan Anggaran Dana Desa.⁴⁴

Anwar dan Mukadarul (2016) membuktikan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukimaningrum (2012), Nurilah (2014), Surastiani dan Handayani (2015), dan Sudirianti dkk (2015) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern

⁴³ Hery, *Pengendalian Akuntansi dan Manajemen.....*, hal.12

⁴⁴ Iwan Novarian Sutawijaya, Ardeno Kurniawan, *Audit Kinerja Mendorong Peningkatan Value Organisasi dalam Mewujudkan World Class Government*, Edisi 1, Cet-1, (Yogyakarta; ANDI, 2020) hal.12

perpengaruh positif dengan kualitas laporan keuangan daerah. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi penerapan sistem pengendalian intern maka kualitas laporan keuangan akan semakin baik. Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali hubungan antara pengendalian sistem intern terhadap kualitas laporan pemerintah desa Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo :

H3 : Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan pemerintah desa

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai bahan referensi tambahan, perbandingan, dan penguat bagi penelitian ini, beberapa penelitian antara lain:

1. Siti Soimah Penelitian yang dilakukan oleh Soimah (2014) berjudul “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkulu Utara”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data primer melalui kuisioner. Responden dalam penelitian ini adalah bagian pengelolaan keuangan dari 28 SPKD Kabupaten Bangkulu Utara. Analisis data dalam penelitian menggunakan metode statistik analisis regresi berganda.⁴⁵

Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa variabel kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten bangkulu utara.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh soimah (2014) adalah sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah, selain itu terdapat persamaan penggunaan variabel

⁴⁵ Siti Soimah, *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkulu Utara*, (Studi empiris pengelolaan keuangan SPKD Kabupaten Bangkulu Utara), Vol 2, No.3, hal.27

independen, yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Perbedaan penelitian penelitian Soimah (2014) dengan penelitian ini yaitu terletak dalam pengguna variabel dependen kualitas laporan pemerintah desa. Sedangkan penelitian soimah tidak menggunakan variabel tersebut.

2. I Gusti Ngurah Siwambudi, Ferianta Wirawan Yasa dan I Dewa Nyoman Budera (2016), Penelitian yang dilakukan Siwambudi, Yasa, dan Bedara (2016) berjudul “ Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Pemerintah Daerah”. Populasi dalam penelitian ini yaitu 37 Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Klungkung. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 36 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang dipilih dengan metode pengambilan sampel dalam teknik purposive sampling. Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui survei dengan teknik kuesioner. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Medorated Regression Analysis*.⁴⁶

Penelitian tersebut memberikan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, intraksi komitmen organisasi dengan kompetensi

⁴⁶ I Gusti Siwambudi, Firanta Wirawan Yasa, I Dewa Nyoman Budera, *Komitemen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi SDM dan Sistem Pengendalian Intern pada Kualitas Laporan Pemerintah Daerah*, (Studi Empiris di SPKD Pemerintah Kabupaten Klungkung), Jurnal Akuntansi, Vol. 2 No.3, hal 12

sumber daya manusia tidak berpengaruh pada kualitas keuangan pemerintah daerah dan interaksi komitmen organisasi dengan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Siwambudi, Yasa, dan Badera (2016), adalah sama-sama meneliti tentang kualitas laporan keuangan pemerintah, selain itu terdapat persamaan dalam variabel independen. Yaitu Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Sistem pengendalian intern.

Penelitian yang dilakukan oleh Marita Endianto, dkk, memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas standar akuntansi pemerintahan, peran audit intern, dan komitmen organisasi secara parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan metode penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas standar akuntansi pemerintah, peran audit internal dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap laporan keuangan pemerintahan, persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel independen yang sama yaitu audit internal. Untuk perbedaannya, faktor independen lainnya yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia.

Penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, sistem akuntansi keuangan, peran internal audit terhadap

kualitas laporan keuangan secara individual dan simultan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi, sistem informasi akuntansi dan peran audit internal berpengaruh positif terhadap pelaporan, faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah akuntansi dan sistem informasi akuntansi keuangan. Penelitian oleh Lilis Setyowati, dkk, memiliki tujuan melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, sedangkan analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel peran teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan memiliki pengaruh positif signifikan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dan peran internal audit secara individual terhadap kualitas laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada variabel laporan keuangan. Persamaan dalam penelitian ini terdapat variabel independen yang sama yaitu peran audit internal dan kompetensi sumber daya, untuk membedakannya, faktor independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian internal.

3. Dyah Puri Surastiani dan Handayani, melakukan penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Salatiga.

⁴⁷Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan bentuk empiris. Lalu menggunakan analisis regresi linier berganda sebagai metode analisis datanya. Penelitian ini memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan variabel lainya yaitu pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu sama-sama meneliti mengenai kualitas daya manusia dan sistem pengendalian intern. Sedangkan perbedaan penelitian ini terletak pada variabel independennya, dalam penelitian ini menggunakan tambahan variabel peran audit internal.

4. Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh sumber daya manusia, sistem akuntansi dengan basis akural secara individual terhadap kualitas terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang terdapat di Kabupaten Bandung, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan penelitian asosiatif, untuk metode analisis datanya menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua variabel independen yang diteliti yaitu sumber daya manusia, sistem

⁴⁷ Dyah Puri Surastiani dan Bestari Dwi Handayani, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Dearah*, Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol. 7 No.2, September 2015

pengendalian intern dan pemahaman basis akural yang memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap variabel dependennya yaitu laporan keuangan pemerintah daerah. ⁴⁸Persamaan penelitian ini adalah sama-sama meneliti kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern. Sedangkan perbedaannya adalah pengaruh independen lainnya yaitu peran audit internal.

5. Dewi Andini dan Yusrawati (2015), penelitian tentang “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada SKPD Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan”. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi SDM, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada dinas yang berada di Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan.⁴⁹

Hasil penelitiannya bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan terhadap daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan kualitas laporan keuangan dan kompetensi sumber daya manusia. Sedangkan perbedaan penelitian ini tidak menggunakan

⁴⁸ Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati, Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi dengan Basis Akural Secara Individual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, (Studi Empiris di SPKD Kabupaten Bandung), Jurnal Akuntansi, Vol.3, No.5, hal.34, November 2015

⁴⁹ Dewi Andini dan Yusrawati, *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah*, (Studi Empiris di SPKD Kabupaten Empat Lawang Sumatra Selatan), Jurnal Akuntansi Dinamika, Vol.5, No.3, hal.68, Agustus 2015

pengendalian sistem intern dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai variabel independen. Serta penelitian yang diarahkan untuk pemerintah daerah sedangkan penelitian yang lebih diarahkan ke pemerinah desa.

6. Kadek Hengki Primayana (2014) penelitian yang berjudul “Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menjelaskan kapasitasn sumber daya manusia perpengaruh terhadap meningkatnya keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, pengendalian intern akuntansi perpengaruh meningkatkan keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pemanfaaan teknologi informasi.⁵⁰

Persamaan penelitian ini menggunakan variabel yang sama seperti variabel SDM, Pemanfatan Teknologi Informasi, dan pengendalian intern. Perbedaanya penelitian ini menambahkan variabel pengawasan keuangan daerah.

J. Kerangka Konseptual

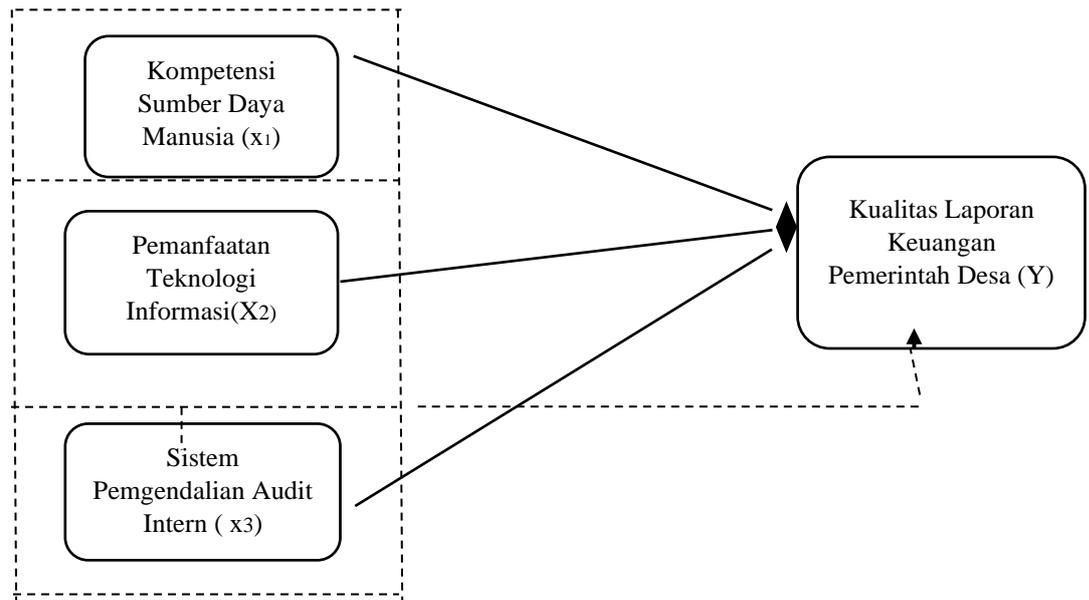
Kerangka Konseptual berguna untuk menjelaskan suatu topik yang akan dibahas dalam penelitian, meliputi variabel dan keterkaitan antara variabelnya dimana pada umumnya berbentuk grafik, untuk lebih jelasnya,

⁵⁰ Kadek Hengki Primayana, *Kapasitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Akuntansi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi, Vol.2, No.5, Juli 2014

hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual



Sumber Data diolah penelitian 2021

Berdasarkan gambar diatas yaitu Variabel bebas (X) dari Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₁), Pemanfaatan Teknologi Informasi(X₂), dan Pengendalian Sistem Intern (X₃), sedangkan variabel terikat (Y) Kualitas Laporan Pemerintah Desa Watutulis Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo.

K. Mapping Variabel, Teori, dan Indikator

1. X₁ (Kompetensi Sumber Daya Manusia)

Variabel kompetensi sumber daya manusia, menggunakan hubungan teori dari Siti Soimah yaitu kompetensi sumber daya manusia terdiri dari 3

Teori yaitu Tanggung jawab, Pelatihan, Pengalaman. Kemudian dipaparkan dalam mapping sebagai berikut :

Tabel 2.1

Mapping Kompetensi Sumber Daya Manusia

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1)	Tanggung Jawab (X1.1)	a.Peran pengelolaan keuangan	Likert	1,2,3
		b.Fungsi akuntansi		
		c. Pedoman proses akuntansi		
	Pelatihan (X1.2)	a.Mendapatkan pelatihan	Likert	4,5,6
		b.Memahami materi		
		c Materi Pelatihan sesuai kebutuhan		
	Pengalaman (X1.3)	a.Pengalaman untuk menjalankan tugas	Likert	7,8
		b.Berpengalaman di bidang akuntansi		

2. X2 (Pemanfaatan Teknologi Informasi)

Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, menggunakan hubungan teori dari Dyah Puri Surastiani yaitu pemanfaatan teknologi informasi terdiri dari 5 Teori yaitu Kecepatan dan ketepatan waktu akses, Ketelitian, Keamanan data, Variasi Laporan atau output, Relevansi dan kesesuaian. Kemudian dipaparkan dalam mapping sebagai berikut :

Tabel 2.2
Mapping Pemanfaatan Teknologi Informasi

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Keamanan Data (X2.1)	a. Tingkat keamanan data dengan adanya sistem password	Likert	1,2,3,4
		b. Tingkat keamanan data dengan adanya menu peringatan		
		c. Tingkat keamanan data yang tersimpan akibat terjadinya tegangan listrik		
		d. Tingkat keamanan data yang tersimpan jika terkena virus		
	Kecepatan dan Ketepatan Waktu Akses (X2.2)	a. Tingkat kecepatan mengakses masuk dan keluar	Likert	1,2,3,4, dan 5
		b. Tingkat kecepatan dalam menginput data		
		c. Tingkat kecepatan dalam pencarian data		
		d. Tingkat kecepatan dalam memproses dan mengolah data		
		e. Tingkat kecepatan dalam mencetak laporan dana desa		
	Ketelitian (X2.3)	a. Tingkat ketelitian dalam perhitungan angka	Likert	1,2,3

		b. Tingkat ketelitian dalam menyajikan data		
		c. Tingkat ketelitian dalam proses analisis data.		
	Variasi Laporan atau Output (X2.4)	a. Memberikan laporan yang bervariasi	Likert	1,2,3,4
		b. Menyajikan laporan harian yang variatif		
		c. Menyajikan laporan bulanan yang variatif		
		d. Mencetak laporan keuangan semester dan tahunan sesuai dengan keperluan		
	Relavansi dan Kesesuaian (X2.5)	a. Tingkat relevansi/kesesuaian dalam menyajikan data	Likert	1,2,3,4
		b. Tingkat relevansi/kesesuaian dalam analisis data		
		c. Tingkat relevansi/kesesuaian dalam pengolahan dan penyimpanan data		
		d. Relevansi/ kesesuaian terhadap pengguna laporan keuangan		

3. X3 (Sistem Pengendalian Intern)

Variabel Sistem Pengendalian Intern, menggunakan hubungan teori dari Kadek Hengki Pramayana yaitu Sistem Pengendalian terdiri dari 4 Teori yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian resiko, Aktivitas Pengendalian, Pemantauan. Kemudian dipaparkan dalam mapping sebagai berikut :

Tabel 2.3
Mapping Sistem Pengendalian Intern

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Pengendalian Sistem Intern (X3)	Lingkungan Pengendalian (X3.1)	a. Penegakkan integritas dan nilai etika	Likert	1,2,3,4, dan 5
		b.Komitmen terhadap kompetensi		
		c.Kepemimpinan yang kondusif		
		d. Pembentukan struktur sesuai dengan kebutuhan		
		e.Pendelegasikan wewenang dan tanggung jawab		
	Penilaian Resiko (X3.2)	a.Analisis secara lengkap terhadap timbulnya pelanggaran	Likert	6,7
		b.Rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran terhadap sistem serta prosedur		
	Aktivitas Pengendalian (X3.3)	a.Proses ke dalam komputer seluruh transaksi telah diotorisasi	Likert	8,9,10,11
		b.Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan		
		c. Pengawai dan atasan telah memahami tujuan kegiatan pengendalian		

		d.Peralatan dan persediaan selalu saya simpan di tempat yang aman		
	Pemantuan (X2.4)	a.Sebagai tindak lanjut dari penelitian terhadap kualitas pengendalian intern, kantor desa telah melakukan perbaikan pengendalian intern	Likert	12,13
		b.Kantor desa menindaklanjuti setiap temuan dan saran yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam laporan keuangan		

4. Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa)

Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa, menggunakan hubungan teori dari Defitri yaitu terdiri dari 4 Teori yaitu Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami. Kemudian dipaparkan dalam mapping sebagai berikut :

Tabel 2.4

Mapping Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa

Variabel	Teori	Indikator	Skala	No. Item
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa (Y)	Relevan (Y1)	a. Laporan keuangan telah sesuai dengan format laporan keuangan	Likert	1,2,3,4, dan 5
		b.Memiliki manfaat umpan balik		
		c.Memiliki manfaat prediktif		
		d.Tepat Waktu		

		e. Lengkap		
	Andal (Y2)	a. Dapat diverifikasi	Likert	6,7,8,9
		b. Penyajian jujur		
		c. Netralitas		
	Dapat dibandingkan (Y3)	a. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	Likert	10,11
		b. Menggunakan kebijakan akuntansi sama dari tahun ke tahun		
	Dapat dipahami (Y4)	a. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan desa telah disusun secara jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna	Likert	12

L. Hipotesis Penelitian

1. X_1 (Kompetensi Sumber Daya Manusia) terhadap Y (Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Desa)

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

H_a = Ada pengaruh positif yang signifikan dari kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

2. X_2 (Pemanfaatan Teknologi Informasi) terhadap Y (Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Desa)

H_0 = Tidak ada pengaruh signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Ha = Ada pengaruh positif signifikan dari pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

3. X₃ (Pengendalian Sistem Intern) terhadap Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa)

Ho = Tidak ada pengaruh signifikan dari pengendalian sistem intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

Ha = Ada pengaruh positif yang signifikan dari pengendalian sistem intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.